**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**MELALUI PROGRAM USAHA EKONOMI KELURAHAN**

***IMPLEMENTATION OF EMPOWERMENT POLICY***

***THROUGH ECONOMIC RECOMMENDATIONS BUSINESS PROGRAMS***

**Moris Adidi Yogia dan Dia Meirina Suri**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau, Jalan Kaharudin Nasution No 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru

Email : diameirinasuri@soc.uir.ac.id

Abstrak

Usaha Ekonomi Kelurahan merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan, penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru dengan mengambil tiga kelurahan sebagai sampel, pengambilan sampel berdasarkan tingkatan keberhasilan dalam melaksanakan program Usaha Ekonomi Kelurahan dengan indikator angka kredit macet, jumlah pemanfaat dan jumlah dana bergulir. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara kemudian data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan di Kota Pekanbaru belum terlaksana secara keseluruhan, beberapa kelurahan belum mengimplementasikan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, hal ini disebabkan kurangnya sumberdaya pengelola yang memahami dan menguasai tugas – tugas yang harus dilakukan seperti bagian analis kredit. Saran yang dapat diberikan adalah diadakannya pelatihan – pelatihan dan pembinaan terhadap pengelola sehingga mereka memahami tugas dan tanggung jawabnya.

**Kata Kunci** : Implementasi, Kebijakan, Pemberdayaan

*Abstract*

*Urban Economic Business is a government policy to improve the community's economy with an empowerment approach, this study aims to see the implementation of community empowerment policies through the Urban Economic Business Program. This research was conducted in Pekanbaru City by taking three villages as samples, sampling based on the level of success in implementing the Urban Economic Business program with indicators of bad credit, number of beneficiaries and the amount of revolving funds. This research method uses a qualitative approach. Data collection techniques using observation and interviews then the data collected were analyzed descriptively. The results of the study found that the Implementation of Community Empowerment Policy Through the Urban Economic Business Program in Pekanbaru City has not been implemented as a whole, several villages have not implemented it properly in accordance with technical instructions and implementation instructions, this is due to the lack of resource managers who understand and master the tasks that must be done like the credit analyst part. Suggestions that can be given are holding training and training for managers so that they understand their duties and responsibilities.*

***Keywords****: Implementation, Policy, Empowerment*

**PENDAHULUAN**

Permasalahan kehidupan masyarakat salah satunya adalah kemiskinan, masalah kemiskinan ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, karena kemiskinan dapat menghambat program pembangunan.Pemerintah berusaha mengatasi masalah ini melalui program peningkatan ekonomi masyarakat yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dilakukan. Program ini menjadi hal yang harus segera dilaksanakan, dengan meningkatnya perekonomian maka pembangunan akan berjalan dengan lancar. Salah satu program yang dilakukan dalam percepatan peningkatan ekonomi adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam program pemberdayaan masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat adalah melalui program pemberdayaan kelurahan yang merupakan salah satu wujud nyata dari percepatan pembangunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, program ini berlandaskan kebijakan pemerintah yang terdapat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SJ tentang pedoman alokasi dana sharing dari Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Desa / Kelurahan pada tanggal 22 Maret 2005

Kota Pekanbaru mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, selain dari angka kelahiran yang cukup tinggi, pertumbuhan penduduk juga di pengaruhi oleh banyaknya pendatang yang berusaha untuk mengadu nasib di Kota Pekanbaru, bagi mereka yang memiliki kemampuan dan *skill* akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan, namun bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan apa – apa hal ini akan mengakibatkan jumlah pengangguran akan bertambah dan otomatis angka kemiskinan akan semakin meningkat.

Untuk mengatasi hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru mulai menggulirkan Program Usaha Ekonomi Kelurahan sejak Tahun 2005 berdasarkan Agenda Nasional (Propenas) dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 592/IX/2004 dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS/132/III/2005 Tanggal 31 Maret 2005 mengeluarkan kebijakan untuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) yang dituangkan secara jelas dalam pedoman umum dan petunjuk teknis serta menunjuk lokasi penerima bantuan dana usaha/kelurahan.

Bentuk riil dari program ini adalah untuk melayani masyarakat pengusaha kecil yang ingin mendapatkan pinjaman modal dari Kantor Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru.Dengan demikian, Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang ada di beberapa Kelurahan di Kota Pekanbaru adalah salah satu alternatif lembaga keuangan bukan bank yang dapat memberikan perhatian kepada masyarakat miskin atau ekonomi lemah yang menginginkan modal bantuan usaha.

Pada awal program ini dijalankan yaitu pada tahun 2005, kelurahan yang menerima bantuan adalah kelurahan Umban Sari dan Kelurahan Muara Fajar dimana masing – masing kelurahan di berikan dana sejumlah Rp. 500.000.000 yang dianggarkan dari APBD Provinsi Riau, dan sampai dengan tahun 2017 jumlah kelurahan yang telah mendapatkan bantuan modal sosial sudah berjumlah 58 ( lima puluh delapan ) kelurahan dimana dana yang digulirkan diberikan secara bertahap untuk kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini mengambil tiga kelurahan yang tingat perkembangannya berbeda yaitu cepat, sedang dan sangat rendah dilihat dari peningkatan jumlah dana, pengelolaan manajemennya, tingkat simpan pinjam, produktifitas usaha yang terus berkelanjutan, serta tingkat kemacetan kredit yang rendah, tingkatan perkembangan dapat dilihat pada tabel perkembangan Usaha Ekonomi Kelurahan pada masing – masing kelurahan berikut ini :

**Tabel I.2 Perkembangan Usaha Ekonomi Kelurahan Maharatu Jaya 2015 - 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Pemanfaat | Dana Bergulir (Rp) | Laba | Jumlah Tunggakan |
| 1 | 2015 | 586 | 3.927.600.000 | 79.382.124 | 62.876.944 |
| 2 | 2016 | 646 | 4.170.600.000 | 88.429.085 | 125.032.422 |
| 3 | 2017 | 818 | 6.483.000.000 | 92.080.700 | 151.833.111 |

Sumber : Laporan Keuangan UEK Maharatu Jaya, 2018

**Tabel I.3Perkembangan Usaha Ekonomi Kelurahan Sidomulyo Barat 2015 - 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Pemanfaat | Dana Bergulir (Rp) | Laba | Jumlah Tunggakan |
| 1 | 2013 | 325 | 2.035.000.000 | 13.235.653 | 215.346.562  |
| 2 | 2014 | 476 | 2.713.550.000 | 25.015.327 | 263.122.444 |
| 3 | 2015 | 539 | 3.084.550.000 | 30.456.657 | 239.047.922 |

Sumber : Laporan Keuangan UEK Sidomulyo Barat, 2018

**Tabel I.4 Perkembangan Usaha Ekonomi Kelurahan Tanah Datar 2015 - 2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah Pemanfaat | Dana Bergulir (Rp) | Laba | Jumlah Tunggakan |
| 1 | 2013 | 433 | 2.509.000.000 | 6.189.124 | 244.082.063 |
| 2 | 2014 | 496 | 3.157.500.000 | 18.323.822 | 284.801.157 |
| 3 | 2015 | 580 | 3.930.000.000 | 8.365.589 | 301.000.000 |

Sumber : Laporan Keuangan UEK Tanah Berlian, 2018

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program Usaha Ekonomi Kelurahan di Kota Pekanbaru dan ntuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui program Usaha Ekonomi Kelurahan di Kota Pekanbaru.

Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan-tujuan baik yang berorientasi pencapian tujuan maupun pemecahan masalah ataupun kombinasi dari keduanya. Secara padat Tachjan (2006 : 31) menjelaskan tentang tujuan kebijakan publik adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik yang bertalian dengan *public goods* (barang publik) maupun *public service* (jasa publik). Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh publik untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik maupun non-fisik.

Menurut *Naning Mardianah* dalam Wirutomo dkk (2003 : 129) pemberdayaan dimaknai mendapatkan kekuatan (power) dan mengaitkan dengan kemampuan golongan miskin untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber daya yang menjadi dasar dari kekuasaan dalam suatu sistem maupun organisasi.

Dengan memperhatikan berbagai pandangan termasuk bias-bias terhadap konsep pemberdayaan itu, beberapa langkah strategis harus ditempuh untuk mengembangkan ekonomi rakyat melalui pemberdayaannya, yaitu :

1. Peningkatan akses ke dalam aset produksi *(productive assets)*
2. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan informan penelitian sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun tehnik yang digunakan dalam memperoleh informan penelitian ini adalah tehnik *snowball sampling* yaitu sebuah tehnik penentuan sumber informasi seperti bola salju yang mengelinding untuk menemukan sumber informasi yang paling tepat dalam memberikan tanggapan tentang kebijakan pemberdayaan masyarakat. Setalah data terkumpul dari setiap infoman penelitian, kemudian akan digunakan metode triangulasi dengan *cek and cross cek* terhadap hasil tanggapan yang diberikan informan penelitian. adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah Kepala Badan Pemberdayaan, Ka Bid Pengembangan UEM, Pengurus Usaha Ekonomi Kelurahan pada masing – masing Kelurahan dan Masyarakat sasaran kebijakan

Untuk menganalisis data, digunakan teknik analisis kualitatif, teknik analisa kualitatif yang digunakan adalah teknik triangulasi, yakni teknik untuk melihat kesahihan bersama dan korelasi yang kuat antar data dan dari berbagai sumber dengan tahapan analisis data adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data

2. Penyajian data

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Peningkatan akses ke dalam aset produksi *(productive assets)***

Peningkatan akses ini adalah kemudahan masyarakat dalam mengakses fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dengan maksud meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berproduksi.Fasilitas yang dimaksud adalah modal usaha yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dengan syarat masyarakat harus memiliki sebuah usaha sehingga penambahan modal yang diberikan dapat menunjang produktivitas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Banyak masyarakat yang memiliki usaha namun usahanya tidak dapat berkembang dengan baik disebabkan kekurangan modal usaha, oleh sebab itu pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan melalui peminjaman modal usaha yang disebut dengan Usaha Ekonomi Kelurahan yang bertujuan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomiannya,

pengelola usaha ekonomi Kelurahan Maharatumembuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan berupa pinjaman modal usaha dengan memberikan syarat adanya sebuah usaha yang telah dijalankan, hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Kelurahan Maharatu sesuai dengan tujuan dari pemberdayaan itu sendiri, yaitu meningkatkan dorongan berusaha bagi masyarakat dan meningkatkan perekonomian mereka.

Syarat yang diberikan oleh Kelurahan Maharatu untuk masyarakat yang ingin melakukan pinjaman modal bukanlah untuk mempersulit masyarakat, namun lebih jauh adalah untuk memastikan bahwa modal yang diberikan dapat dikembalikan dengan cara mencicil sehingga modal yang sudah dikembalikan dapat kembali digulirkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan.

Setiap proposal pengajuan pinjaman yang di berikan oleh masyarakat, pihak atau pengelola usaha ekonomi kelurahan juga melakukan survey ke rumah dan ke tempat usaha mereka untuk memastikan bahwa masyarakat tersebut memang memiliki sebuah usaha, hal ini juga untuk mengontrol pemberian bantuan dana agar tersalur sesuai dengan tujuan pemberian bantuan modal ini.

Prosedur yang berlaku ini tidaklah memberatkan masyarakat, karena menurut mereka peminjaman bantuan modal di Kelurahan Maharatu ini tidaklah sulit,Pemberian bantuan modal usaha dilakukan untuk meningkatkan produktivitas maupun untuk pengembangan usaha, oleh sebab itu syarat utama diberikannya bantuan modal adalah adanya usaha yang telah berjalan, usaha tersebut memiliki prospek yang bagus sehingga apabila diberikan bantuan dana akan memberikan pengaruh yang signifikan untuk kemajuan usaha kedepannya.

pelaksana atau pengelola dari program usaha ekonomi kelurahan pada awal berdirinya tidaklah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian pengelola terhadap dana bergulir yang telah mereka salurkan, meskipun peningkatan akses kedalam asset produksi dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah peminjam yang banyak, namun pengelola usaha ekonomi kelurahan pada Kelurahan Sidomulyo Barat tidak memastikan apakah masyarakat peminjam tersebut benar – benar memiliki sebuah usaha, hal ini menyebabkan angka kredit macet menjadi tinggi kurang berkembangnya modal yang ada di Kelurahan Sidomulyo Barat disebabkan karena kurangnya perhatian dari pengelola sehingga dana yang disalurkan tidak terkontrol dengan baik.Masalah ini terjadi diakibatkan kurang seriusnya pengelola dalam melaksanakan program ini sehingga pada saat dilakukan penggantian kepengurusan dapat dilihat adanya kemajuan.

Pada Kelurahan Tanah Datar dengan usaha ekonomi kelurahan yang bernama tanah berlian, program pemberdayaan masyarakat yang mereka lakukan termasuk tidak berjalan, kepemilikan usaha bukanlah menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan modal, setiap masyarakat yang mengajukan pinjaman dengan mudah disetujui oleh pengelola sehingga pernyaluran dana tidak terkontrol, dana yang bergulir pada masyarakat tidak dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, namun lebih banyak dijadikan untuk kebutuhan konsumtif.

Permasalahan pada seleksi pemanfaat dana, dimana seharusnya pemanfaat program ini adalah masyarakat miskin yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian mereka dengan peminjaman dana untuk pengembangan usaha yang mereka miliki, namun dalam pelaksanaannya siapa saja bisa mendapatkan pinjaman dana ini dan tidak dilakukan penyeleksian terlebih dahulu sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat peminjam dana yang tidak mengembalikan dana tersebut.

**Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat**

Rakyat sebagai pelaku ekonomi yang bertindak sebagai produsen atau penjual merupakan posisi yang lemah dimana ada begitu banyak pesaing dari perusahaan besar yang akan menjadi *competitor* yang secara tidak langsung akan mematikan usaha mereka, disinilah pemerintah bertindak sebagai pelindung yang akan menjamin usaha yang dijalankan masyarakat akan tetap berjalan dengan memperkuat transaksi masyarakat dengan menyediakan fasilitas sebagai jaminan keberlangsungan transaksi masyarakat.

Mitra usaha sangat memberikan pengaruh yang baik terhadap perkembangan sebuah usaha, adanya mitra akan memudahkan masyarakat pelaku usaha dalam mendapatkan *supply* produk atau bahan baku dan penyaluran hasil dari usaha masyarakat, adanya mitra usaha akan memberikan kepastian untuk hasil yang telah diproduksi tersalurkan atau menghasilkan *out put* berupa pendapatan yang jelas, sehingga mengurangi resiko hasil produksi tidak terjual. Dari hasil wawancara dengan pengelola dari Kelurahan Maharatu, Sidomulyo Barat dan Kelurahan Tanah Datar dapat diketahui bahwa akses kemitraan usaha belum ada dilaksanakan, artinya masyarakat menyalurkan atau menjual secara mandiri ke pembeli atau mitra usaha yang mereka cari mereka sendiri, hal ini berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada pengelola UEK – SP masing – masing kelurahan dan kepada masyarakat pemanfaat.

Adanya wadah kemitraan usaha yang di sediakan oleh pelaksana program pemberdayaan masyarakat akan memudahkan masyarakat dalam mengembangkan usaha yang mereka jalankan, wadah kemitraan usaha yang disediakan akan menjamin hasil produksi yang dilakukan oleh masyarakat dapat tersalurkan dengan cepat, masyarakat tidak akan takut bahwa hasil produksi mereka akan sia – sia karena setiap hasil produksi sudah ada yang menampungnya, dalam hal ini pemerintah dapat menyediakan koperasi sebagai wadah yang akan menjualkan secara langsung produk – produk yang mereka hasilkan, wadah kemitraan yang akan meningkatkan posisi transaksi belum disediakan, dikarenakan usaha yang dijalankan masyarakat lebih banyak bersentuhan langsung dengan pembeli. Namun demikian seharusnya pemerintah tetap menyediakan wadah kemitraan yang akan menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa usaha yang mereka jalankan di dukung oleh pemerintah melalui penyediaan koperasi, tapi disni masyarakat pemanfaat program dituntut untuk lebih mandiri dalam menyalurkan hasil produksi mereka.

Satu usaha pemerintah adalah memberikan informasi dalam pengembangan usaha kepada masyarakat pemanfaat program dengan memberikan arahan bagaimana cara – cara pengembangan usaha, memberikan informasi mengenai apa yang menjadi trend penjualan saat ini atau apa yang sedang meningkat permintaan pasarnya serta bagaimana cara memasarkan hasil usaha sehingga usaha masyarakat dapat berkembang dengan signifikan. Informasi ini sangat penting bagi masyarakat karena mental mereka yang sudah terkunci dengan kebiasaan – kebiasaan tanpa melihat bahwasanya permintaan pasar akan selalu mengalami perubahan, dan apabila pelaku ekonomi tidak mengikuti perkembangan yang terjadi maka dapat dipastikan usaha mereka akan cepat hancur atau tidak berkembang. Apabila dilihat dari usaha yang dijalan para pemanfaat bantuan modal ini maka dapat dikatakan bahwa mereka sama sekali tidak mendapatkan informasi mengenai cara – cara pengembangan usaha maupun strategi – strategi pemasaran produk karena rata – rata masyarakat melakukan usaha secara konvensional seperti berdagang di warung dan dipasar begitu juga masyarakat yang bergerak dibidang pertanian, mereka melakukan usaha pertanian dan penjualan hasil pertanian dengan cara yang sama dari tahun-ke tahun

**Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat**

Pada tiga kelurahan yang dijadikan sampel dalam penelitian menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk mengubah kondisi perekonomian mereka sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah pemanfaat dana yang meningkat setiap tahunnya, kemudian dorongan yang diberikan oleh pemerintah dilihat dari keberpihakan kepada masyarakat miskin pada beberapa kelurahan sudah dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan meminjam bantuan modal usaha dimana prioritas utama diberikan kepada masyarakat miskin, namun masih ada kelurahan yang tidak melihat keadaan ekonomi masyarakat dimana tidak semua pemanfaat dana bukanlah masyarakat miskin. Kurangnya pembinaan dari pemerintah kepada masyarakat dalam menggunakan dana yang dipinjam menyebabkan masih banyak yang menggunakan dana untuk kebutuhan konsumtif dan tidak dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya sehingga pada beberapa kelurahan Usaha Ekonomi Kelurahannya tidak berkembang yang disebabkan angka kredit macetnya yang tinggi.

**KESIMPULAN**

Peningkatan akses ke dalam aset produksi *(productive assets)* telah dilakukan dengan baik oleh pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan, masing – masing kelurahan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan bantuan modal usaha, masyarakat tidak dipersulit dengan berbagai persyaratan dalam melakukan pinjaman modal, apabila masyarakat sudah memiliki sebuah usaha yang akan dikembangkan dan ditingkatkan.

Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan belum dilakukan, masyarakat yang memanfaatkan dana atau modal sosial berusaha sendiri dalam melakukan pengembangan usahanya, mitra usaha yang seharusnya dapat meningkatkan transaksi masyarakat dicari oleh masyarakat sendiri, pemerintah belum berperan dalam menyediakan maupun menjadi perantara antara masyarakat dengan mitra usaha.

**SARAN**

Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi maka bagi pengelola untuk dapat memberikan dorongan dan motivasi bagi masyarakat dalam mengembangkan usahanya, Memberikan atau menyediakan wadah untuk menampung hasil usaha masyarakat sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam memasarkan produk yang mereka buat, melakukan penyeleksian dan lebih teliti dalam memberikan bantuan modal kepada masyarakat terutama masyarakat yang memiliki permasalahan dalam pengembalian dana dan menyediakan sumberdaya manusia yang khusus menangani masalah penunggakan cicilan masyarakat.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

1. Terimakasih kepada LPPM Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
2. Terimakasih kepada Kelurahan Maharatu, Sidomulyo Barat dan Tanah Datar terutama pengelola UEK-SP yang telah memberikan izin melakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Arlisa, (2015). Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK - SP) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ., Jom Fisip Vol. 2 No. 2

Hikmat H. (2006). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora.

H.M. Safi’i.(2009). Manajemen Pembangunan Daerah. Malang: Averroes Press.

Moleong Lexy.(2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya.

Nugroho, D. Riant, 2003, kebijakan publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi),Cetakan 2. Jakarta: Gramedia.

Paulus Wirutomo dkk.(2003). Paradigma Pembangunan di Era Otonomi Daerah. Jakarta : Penerbit Cipruy.

Solichin Abdul Wahab.(2012). Analisis Kebijakan Publik : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara.

Subarsono. (2012). Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yokyakarta: Pustaka Pelajara.

Sujianto. (2009). Pemberdayaan menuju Masyarakat Mandiri. Pekanbaru : Alaf Riau.,

Sumaryadi Nyoman.(2005)., Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat.Jakarta : Penerbit Citra Utama.

Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Penerbit AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Usman Sunyoto. (2004). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar